

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sunarno, 2008). Fisher (1997) menyebutkan bahwa pemerintah baik ditingkat pusat maupun lokal harus memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dalam bentuk program pembangunan. Gramlich (1994) menjelaskan pemerintah harus melakukan perbaikan infrastruktur.

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Dalam APBD, pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Aschauer (1999) menyebutkan bahwa pemerintah harus mengarahkan bentuk pengeluaran publik kearah yang bersifat produktif seperti halnya Belanja Modal. Belanja Modal akan

memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Chude dan Chude, 2013; Gemmell dan Sanz, 2013).

Berikut ini adalah data Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2009-2017.

Tabel 1.1
Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Periode 2009-2017.

No	Tahun	Belanja Modal (Juta Rp)	% Perubahan
1	2009	1,696.45	
2	2010	1,678.01	(1.09)
3	2011	1,890.48	12.66
4	2012	2,370.95	25.42
5	2013	3,197.48	34.86
6	2014	3,068.06	(4.05)
7	2015	2,700.12	(11.99)
8	2016	3,463.87	28.29
9	2017	2,951.72	(14.79)

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa besarnya Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi selama 9 tahun terakhir mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana terlihat bahwa pada tahun 2010 jumlah Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 1,09% sedangkan pada 2011 sampai 2013 Belanja Modal mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2014 dan 2015 jumlah Belanja Modal mengalami penurunan yakni sebesar 4,05% dan 11,09%. Selanjutnya pada tahun 2016 total Belanja Modal kembali mengalami peningkatan sebesar 28,29%. selanjutnya pada tahun 2017 Belanja Modal kembali mengalami penurunan sebesar 14,79%.

Permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah di Provinsi Jambi diantaranya masih rendahnya porsi Belanja Modal dibandingkan belanja operasi diindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menganggarkan alokasi

Belanja Modal untuk anggaran sektor publik. Rendahnya porsi Belanja Modal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kelangsungan pembangunan di daerah karena Belanja Modal merupakan pengeluaran modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya beban dalam pemeliharaan aset yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dari aset tersebut serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (BPKP Provinsi Jambi, 2018).

Permasalahan selanjutnya yang ditemukan terkait dengan Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yaitu lemahnya sisi perencanaan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Modal. Dimana ditemukan bahwa perencanaan pembangunan dalam menggunakan Belanja Modal sering tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan sehingga efektivitas penggunaan anggaran Belanja Modal relatif kurang (BPKP Provinsi Jambi, 2018).

Permasalahan lain yang penulis temukan yakni lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan anggaran Belanja Modal sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran penggunaan anggaran Belanja Modal tersebut sehingga banyak proyek-proyek bermasalahan dalam perjalanan, yang tentunya merugikan banyak pihak karena proyek tersebut terbengkalai (BPKP Provinsi Jambi, 2018).

Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah daerah di Provinsi Jambi pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan

daerah secara keseluruhan. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah bervariasi antar daerah. Apabila dana yang tersedia pada pemerintah daerah terbatas tentunya Belanja Modal susah untuk ditingkatkan (BPKP Provinsi Jambi, 2018).

Selanjutnya, berdasarkan data di atas diketahui bahwa Belanja Modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami perubahan yang berfluktuasi, dimana terkadang naik namun pada tahun tertentu mengalami penurunan. Dalam usaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan tentunya dibutuhkan Belanja Modal yang cukup besar, tetapi apabila Belanja Modal itu berkurang tentunya merupakan suatu kerugian bagi pemerintah daerah. Berkurangnya Belanja Modal tentunya belanja yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Hal ini tentunya tidak baik dibiarkan berlangsung lama maka perlu ada upaya agar Belanja Modal itu dapat ditingkatkan.

Abdillah dan Mursinto (2016) pernah melakukan penelitian tentang *the effects of financial balance transfer and regional own-source revenue on regional expenditure of regencies and Municipalities in East Java Province*. Penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan. Astutik dan Kuntara (2017) melakukan penelitian tentang *Flypaper Effect and Factors Affecting Regional Government's Expenditure at Districts of Yogyakarta Special Region Province 2008 – 2014*.

Menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Terjadinya perubahan yang berfluktuasi pada Belanja Modal tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama yang penulis identifikasi adalah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa PAD adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah untuk dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kawedar, dkk, 2008).

Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkatkan investasi Belanja Modal sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Modal karena Pendapatan Asli Daerah banyak terpakai untuk belanja operasi lain. Bird (1993) menjelaskan salah satu masalah yang dihadapi dalam rangka desentralisasi fiskal

adalah tidak cukupnya pendapatan pemerintah daerah dalam rangka menutupi belanja daerah.

Permasalahan yang dihadapi daerah otonomi pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. (Halim, 2007). Menurut Halim dan Abdullah (2006) besaran jumlah Belanja Modal akan ditentukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tentunya memiliki dana yang cukup besar untuk Belanja Modal sehingga Belanja Modalnya bisa tinggi.

Beberapa riset terdahulu membuktikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Modal (Holtz-Eakin dan Tilly, 1994; Susanti dan Fahlevi, 2016; Hartiningsih dan Halim, 2015). Namun ada juga penelitian lain yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Situngkir dan Manurung, 2009).

Dengan demikian diketahui bahwa adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yakni ada yang menemukan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali pengaruh variabel tersebut di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi alokasi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan antar daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu sesuai dengan urusan dan prioritas daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk pemerataan dan keadilan secara selaras demi menggilir kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai penyelenggaraan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal pembangunan berkelanjutan.

Menurut *Mardiasmo* (2004) pada era otonomi daerah besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima akan menentukan besaran belanja daerah termasuk Belanja Modal. Ketika daerah menerima DAU dalam jumlah yang besar maka besaran Belanja Modal juga akan meningkat. *Jin and Barry* (2006) dengan adanya desentralisasi fiskal akan meningkatkan besaran Belanja Modal pada pemerintah daerah.

Banyak riset terdahulu yang berhasil membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (*Oates, 1993; Situngkir dan Manurung, 2009; Weingast, 2009; Susanti dan Fahlevi, 2016; Pemasari dan Mildawati, 2016*). Namun ada juga penelitian lain yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (*Heliyanto dan Handayani, 2016*).

Dengan demikian diketahui bahwa adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

yakni ada yang menemukan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali pengaruh variabel tersebut di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Variabel berikutnya yang diidentifikasi dapat mempengaruhi alokasi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan yang mana diatur dengan Peraturan Pemerintah dalam bentuk realisasi belanja daerah. DAK dialokasikan dari APBN untuk membantu membiayai program khusus di daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Darise (2008) berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu. Semakin besar jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah daerah maka akan semakin besar pula Belanja Modal daerah tersebut.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (Pemasari dan Mildawati, 2016; Heliyanto dan Handayani, 2016; Situngkir dan Manurung, 2009; Susanti dan Fahlevi, 2016). Namun ada juga penelitian lain yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Situngkir dan Manurung, 2009).

Selanjutnya variabel lain yang dapat mempengaruhi total Belanja Modal adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain karena pertimbangan politis, alasan lain dari pemberian Dana Bagi Hasil ini adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian dan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 (Nordiawan, 2009:49).

Menurut Halim dan Mujib (2009) untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima suatu daerah maka Belanja Modalnya juga akan tinggi.

Banyak riset terdahulu yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (Susanti dan Fahlevi, 2016; Heliyanto dan Handayani, 2016). Namun ada juga penelitian lain yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Pemasari dan Mildawati, 2016).

Variabel selanjutnya yang penulis juga sebagai faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) digunakan untuk belanja langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset dan sebagainya yang didalamnya juga terdapat belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung.

Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan besaran Belanja Modal akan dipengaruhi oleh besaran SiLPA pada suatu daerah karena SiLPA tahun sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, Belanja Modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Beberapa riset terdahulu telah menemukan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Mentayani & Rusmanto, 2013), namun ada juga penelitian lain yang menemukan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Aditiya dan Dirgantari, 2017).

Dengan demikian diketahui bahwa adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) tentang pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

terhadap Belanja Modal yakni ada yang menemukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali pengaruh variabel tersebut di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Situngkir dan Manurung (2009) yang meneliti tentang efek memiliki pendapatan daerah, pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 1) variabel bebas, pada penelitian ini penulis menambah dua variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sementara pada penelitian terdahulu variabel bebasnya hanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, 2) objek penelitian, pada penelitian ini objeknya Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sedangkan pada penelitian terdahulu objeknya adalah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, 3) waktu penelitian. Alasan peneliti mengkaji topik ini adalah ingin mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Penelitian ini difokuskan pada Belanja Modal yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Artinya, penulis menjadi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai variabel bebas dan nanti akan diteliti pengaruhnya terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah kajian melalui sebuah penelitian yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah tesis yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
5. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis tetapkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
2. Pengaruh Dana Aalokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
5. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori, pengembangan metodologi dan rekomendasi kebijakan. Berikut ini dijelaskan manfaatnya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Teori
 - a. Memperkaya teori-teori tentang Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah serta dana transfer
 - b. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam kesesuaian materi yang diterima di perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

2. Pengembangan Metodologi

Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian tentang Belanja Modal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Rekomendasi Kebijakan

- a. Tersedianya data dan informasi tentang Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah serta dana transfer. Sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Belanja Modal. berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan manfaat bagi pengembangan teori, pengembangan metodologi dan rekomendasi kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan literature, dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, referensi penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III : Metode penelitian, yang berisikan desain penelitian populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

variabel penelitian dan metode pengukuran, pengujian instrumen, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, deskripsi variabel penelitian, pengujian instrumen, analisis data hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran, berisikan kesimpulan penelitian yang dilakukan, implikasi, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang terhadap subjek penelitian.